



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI VI DPR RI: BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM,
BUMN, DAN INVESTASI**

Tahun Sidang	:	2017-2018
Masa Persidangan	:	I
Jenis Rapat	:	Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan: 1. Menteri Perindustrian RI; 2. Menteri BUMN RI (Menteri berdasarkan Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2017 tanggal 6 September 2017, hal Penunjukan Sementara Waktu Menteri Perindustrian untuk Menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI dalam rangka Pembahasan terkait dengan Badan Usaha Milik Negara).
Sifat Rapat	:	Terbuka
Rapat ke	:	36 (Tiga Puluh Enam)
Hari/Tanggal	:	Senin, 11 September 2017
W a k t u	:	Pukul 19.50 s.d 21.20 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI
Ketua Rapat	:	Ir. H. Teguh Juwarno, M.Si. (Ketua Komisi VI DPR RI/F-PAN), didampingi oleh: 1. Bowo Sidik Pangarso (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/F-PPG); 2. Mohamad Hekal, M.B.A. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Gerindra); 3. Ir. H. Azam Azman Natawijana (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-PD); 4. H. Inas Nasrullah Zubir, B.E., S.E. (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI/ F-P. Hanura).
Sekretaris Rapat	:	Wahyu Prameswari, S.H., M.Si. (Kabag Set. Komisi VI DPR RI)
A c a r a	:	Membahas Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN Tahun 2018 dan Pembahasan Usulan Program-program yang Didanai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK).
Hadir	:	35 dari 49 Anggota Komisi VI DPR RI.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI dan Menteri BUMN RI (Menteri berdasarkan Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2017 tanggal 6 September 2017) dibuka pada pukul 19.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda Rapat Kerja pada hari Senin, 11 September 2017 dalam rangka membahas Persetujuan RKA Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN Tahun 2018 dan Pembahasan Usulan Program-program yang Didanai oleh DAK.

3. Ketua Rapat menyampaikan hasil konsinyering tanggal 7 September 2017 dalam rangka pembahasan RKA Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN Tahun 2018 dan Usulan Program-program yang Didanai oleh DAK.
4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Menteri Perindustrian RI dan Menteri BUMN RI (Menteri berdasarkan Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2017 tanggal 6 September 2017) untuk memberikan tanggapan/penjelasan mengenai RKA Kementerian Perindustrian dan Kementerian BUMN Tahun 2018 dan Usulan Program-program yang Didanai oleh DAK.
5. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan atas penjelasan Menteri Perindustrian RI dan Menteri BUMN RI (Menteri berdasarkan Surat Presiden Nomor R-44/Pres/09/2017 tanggal 6 September 2017).

II. KESIMPULAN

A. Kementerian Perindustrian

1. Komisi VI DPR RI menerima pagu anggaran Kementerian Perindustrian dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 sebesar **Rp2.827.854.207.000,00** (*Dua Triliun Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).
2. Komisi VI DPR RI menerima usulan penambahan anggaran Kementerian Perindustrian untuk 25 (dua puluh lima) kegiatan, sebesar Rp1.692.250.000.000,00 (*Satu Triliun Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), sehingga total anggaran Kementerian Perindustrian Tahun 2018 menjadi sebesar **Rp4.520.104.207.000,00** (*Empat Triliun Lima Ratus Dua Puluh Miliar Seratus Empat Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).
3. Komisi VI DPR RI **belum** bisa menerima usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Industri Kecil dan Menengah sebesar **Rp563.689.096.000,00** (*Lima Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*), sebagaimana tercantum dalam RUU APBN TA 2018 Pasal 12 ayat (4) huruf d.

Selanjutnya, keputusan Komisi VI DPR RI akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

Catatan:

Fraksi Partai Gerindra belum dapat memberi pendapat terhadap RKA K/L Tahun 2018.

B. Kementerian BUMN

Komisi VI DPR RI menerima pagu anggaran Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 291/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2017 dan Menteri Keuangan Nomor S-593/MK.02/2017 sebesar **Rp247.041.755.000,00** (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Selanjutnya, keputusan Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN akan disampaikan kepada Badan Anggaran DPR RI untuk disinkronisasi.

Catatan:

Fraksi Partai Gerindra belum bisa memberikan pendapat terhadap RKA Kementerian BUMN Tahun 2018.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 21.20 WIB.